

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul Wahab, Solichin, 2012, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model – Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdurrahman, Soejono, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Akhmad Syarifudin, 2018, *Buku Ajar Perpajakan*, STIE Putra Bangsa, Kebumen.
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, MSc, 2016, *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, Social Security Development Institute (SSDI).
- Fajar, Mukti, Yulianto, Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Garner, Bryan A. (Ed), *Black's Law Dictionary*, 1999, Thomson, T.Tp.
- Handoyo, Eko, 2012, *Kebijakan Publik*, Widya Karya, Semarang.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Herlina Rahman dalam Phaurela Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, 2018, Deepublish Publisher, Yogyakarta
- Jamaluddin Ahmad, 2015, *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*, Gava Media, Yogyakarta
- Lawrence M. Friedman, 1984 "What is a Legal System" dalam *American Law*, W.W Norton and Company, New York.
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2009, Andi Offset, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Nurbaiti, Siti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Universitas trisakti, Jakarta.
- Purwadarminta (Kamus Umum Bahasa Indonesia) dalam Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, 2008, Kencana, Jakarta.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*, Alfabet, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suwitri, Sri, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, 2008, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Widodo, Joko, 2007, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang.

b. Jurnal

Ahmad Ridwan, Sigit Winarko dan Eko Siswanto, “ Jobmix Beton Menggunakan Pasir Lumajang dan Penambahan Additive Masterpozzolith 402R “, *Jurnal CIVILLA*, Volume 3, No. 2, 2018.

Doma Madhan Setia Ardana, Taufik Hery Purwanto, “Penentuan Jalur Evakuasi Dan Dampak Banjir Lahar Dingin Gunung Merapi Magelang, Jawa Tengah”, *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume 2, No. 2, 2013.

Gambaran Umum Kondisi Daerah, magelangkab.go.id, diakses pada 19 Mei 2023.

Soegijatna Tjakranegara 995:36 dalam Wawan Susilo, “ Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat “, *Jurnal IUS*, Vol. 02, No. 01, 2015.

Suwarno, Agus Endro dan Suhartiningsih, “ Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah “, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7, No. 2, September 2008.

Yeremia Eka, “ Aliansi Pengemudi dan Penambang Protes Penetapan Pajak Bukan Logam dan Batuan “, <https://magelang.sorot.co/berita-5078-link-.html>, diakses pada 22 Mei 2023.

Zainab Ompu Jainah, “ Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional) “, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 2, No. 2, September 2011.

Zeolita Aprilian, Dhemi Harlan, Edy Anto Soentoro, dan Aulia Zahroni, “ Analisis Agradasi, Degradasi, dan Sedimentasi di Sungai Pabelan

Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010“, Jurnal on Education, Volume 05, No. 03, Maret – April 2023.

Zufadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis“, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, 2013.

c. Media Online dan Internet

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Banyaknya Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Luas Areal, Produksi dan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bahan Galian Mineral Logam, Non Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah Update 2021, <https://jateng.bps.go.id/statistictable/2021/04/08/2180/banyaknya-ijin-usaha-pertambangan-iup-luas-areal-produksi-dan-tenaga-kerja-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-bahan-galian-mineral-logam-non-logam-dan-batuan-di-provinsi-jawa-tengah-2020.html>, Diakses pada 10 Mei 2023.

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Potensi Sumber Daya Dan Cadangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan, <https://geoportal.esdm.go.id/minerba/>, diakses pada 20 Mei 2023.

Lis Retno Wibowo, “Jalan Serumbung Rusak Akibat Tambang, Perbaikan Butuh Rp 10 Miliar”, <https://radarmagelang.jawapos.com/berita/mungkid/2023/04/06/jalan-srumbung-rusak-akibat-tambang-perbaikan-butuh-10-miliar/>, diakses pada 07 Juni 2023.

Muhammad Iqbal Amar, “Truk Tambang Biang Kerusakan di Kecamatan Dukun Magelang”, <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/mungkid/2023/02/21/truk-tambang-biang-kerusakan-jalan-di-kecamatan-dukun-magelang/>, diakses pada 18 Mei 2023.

d. Tugas Akhir

Burhanuddin Alwi, 2020, Implementasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Magelang Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum dan Kaitannya Dengan Fungsi Mengatur Pajak, Skripsi, Program Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ricky Pangeran Adi Putra Panjaitan, 2013, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Magelang, Skripsi, Program Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Firda Fachrin Nisa, 2018, Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Atas Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kabupaten Klaten, Skripsi, Program Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

e. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah No 543/45 tahun 2018 tanggal 18 Juni 2018.

Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/202/KEP/23/2019 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bupati Magelang.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

f. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Zumaroh, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pada tanggal 18 September 2023 Pukul 15.00.

Wawancara dengan Bapak Nida Nur Arifin, Ketua Merapi Trans Community (MTC), pada tanggal 22 September 2023 Pukul 10.00.

Wawancara dengan Bapak Erfin Yulianto Efendi, Ketua Jaringan Pengemudi Angkutan Pasir (JPAP) Magelang Raya, pada tanggal 22 September 2023 Pukul 14.00.

Wawancara dengan Ibu Ibu Triyogo Siswo Rini, S.E., M.M. Selaku Kepala Bidang Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan, dan Sengketa Pajak BPPKAD Kabupaten Magelang, pada tanggal 19 September 2023 Pukul 15.30.